

**Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Infrastruktur Jalan di
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora**

Oleh:

Septiana Cahyaningtyas

(14010110120069)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id.

District of community participation Kradenan is worthy to be considered in conjunction with the Musrenbang (Council Development Plan). In a society there are social standing standing-called socio-economic status of the participation of the community planning forums (Council Development Plan). This study aims to determine the extent to which the relationship of socioeconomic status and community participation Musrenbang (Council Development Plan). The hypothesis of this study is no influence of socioeconomic status on the participation of the community planning forums (Council Development Plan) Infrastructure in District Kradenan. This study used a descriptive type with a sample of 96 people in the District Kradenan. The sampling technique used in this study is purposive sampling with sampling using the formula Frank Lynch. Data collection techniques by using questionnaires, interviews and documentation. Analysis of the data used is quantitative and qualitative. The tools used are simple regression. While hypothesis testing using t-test (t-test) and the coefficient of determination. Keywords that are used are socio-economic status, community participation, and planning forums (Council Development Plan) Infrastructure. The conclusion that there is a significant relationship and positively influence the socio-economic status of the community participation Musrenbang (Council Planning and Development) District of Kradenan not high

enough, because the socioeconomic status of the District Kradenan still low. The relationship of socio-economic status of the people of the District Kradenan 0.474 and the influence of socio-economic status of the community participation Musrenbang (Development Planning Meeting) by 5.22 percent. So it can be said that socio-economic status is not the dominant factor in influencing people's participation Musrenbang (Development Planning Meeting).

Keyword : socioeconomic status, community participation, development planning, infrastructure

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekumpywordlan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif. Masyarakat menjadi fokus terpenting dalam perencanaan besar yang akan dilakukan, perencanaan yang akan menghasilkan kepuasan dari masyarakat , sehingga pemerintah sangat membutuhkan masyarakat atau publik untuk menjalankan kegiatannya tersebut. Kemauan pemerintah untuk memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan langkah maju. Namun, walaupun ada kemauan pemerintah , pelaksanaan konsep ini di lapangan masih cukup banyak mengalami hambatan. Hambatan yang pertama yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Beberapa hal yang pertimbangan hasil-hasil pembangunan yang belum menjangkau secara merata di kehidupan masyarakat, terutama di dalam masyarakat pedesaan yang jauh kehidupannya perlu diperhatikan oleh pemerintah kesenjangan ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak mertanya pembagian wilayah ekonomi tingkat pendapatan per (kapita) penduduk

kemiskinan, kemakmuran dan mekanisme pasar. Dampak negatif terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang partisipatif di Indonesia, karena pembangunan telah menjadi ideologi kedua negara kita, maka orang pun menjadi enggan membicarakan permasalahan pembangunan secara kritis dan terbuka. Keengganan rakyat untuk membicarakan permasalahan pembangunan menyebabkan sulit feed back dari rakyat perihal pelaksanaan pembangunan di negara kita. Sementara itu, para aparat negara menjadi sangat reaktif apabila ada kritik yang muncul dari siapapun yang menyangkut pembangunan di Indonesia. Sifat "tertutup" rakyat dan sifat reaktif para aparat pemerintah itu sangat merugikan kita semua dalam usaha mengembangkan proses pembangunan yang bersifat partisipatif.

Dengan demikian beberapa hal yang wajib diperhatikan Pemerintah Daerah, terutama pada Pemerintah Kabupaten Blora untuk memberikan Perencanaan Pembangunan yang memberikan dampak positif kelangsungan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD yang terkait di Kabupaten Blora. Dengan adanya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dari tingkat bawah atau Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat. Dengan terselenggaranya Musrenbang yang mengikutsertakan masyarakat diharapkan mampu untuk menampung aspirasi yang dibutuhkan masyarakat serta desanya. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan pula dapat terfokus apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama pada . kecamatan di Kabupaten Blora.

Rencana Kerja dan Pendanaan RKPD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan wujud dari pola perencanaan partisipatif, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai

komitmen pemerintah daerah harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat terwujud keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran di Kabupaten Blora dalam dokumen RKPD Tahun 2013 sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora.

Beberapa permasalahan ataupun sasaran yang akan di capai oleh pemerintah Blora pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana irigasi
3. Meingkatkan kualitas dan kuantitas air bersih
4. Meningkatnya kualitas sanitasi di wilayah pemukiman
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas drainase
6. Meningkatnya pengelolaan sampah

Program prioritas dari Pemerintah Blora adalah sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi/pemerliharaan Jalan dan Jembatan
 - a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
 - b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
 - a. Pembangunan saluran drainase/ Gorong-gorong
3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya
 - a. Pembangunan Jaringan irigasi
 - b. Pembangunan Embung

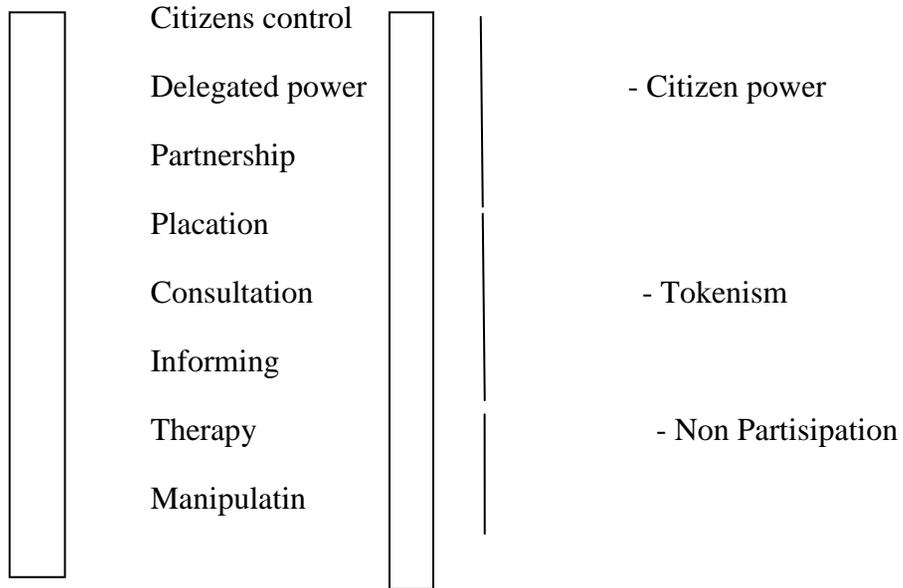
4. Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan

- a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Sementara itu partisipasi masyarakat memiliki berbagai bentuk dan tingkatannya. Menurut Arstein (dalam Panudju, 1999: 69-76) terdapat 8 tangga tingat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, sebagaimana gambar berikut yaitu:

Gambar 1.3

Piramida Sosial



Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manipulasi

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah di mana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

b. Theraphy

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya

kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka

c. Informing

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Meskipun demikian yang terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana

d. Consultation

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survey tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat

e. Placation

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat

yang anggota-anggota lainnya berasal dari wakil-wakil berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah

f. Partnership

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi

g. Delegated power

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas

h. Citizen Control

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peneliti mengambil sampel di Kabupaten Blora kemudian mengambil 10 desa di Kecamatan Kradenan tersebut untuk dijadikan responden, Pada sampel *stakeholder* digunakan teknik *purposive sampling* antara lain meliputi Perangkat Desa serta tokoh masyarakat. Sedangkan dari unit sampel masyarakat digunakan teknik *random sampling* dengan jumlah populasi sepuluh kelurahan yaitu Megeri 2138 jiwa, Nglebak 1979 jiwa, Getas 3986 jiwa, Nginggil 416 jiwa, Ngrawoh 596 jiwa, Mendenrejo 11.287 jiwa, Sumber 10.114 jiwa, Mojorembun 2.828 jiwa, Medalem 3.012 jiwa, dan Nglungger 2162 jiwa. (BPS Kabupaten Blora)

1.10.3. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.¹ sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel probabilitas yaitu suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

Pengambilan sampel ini memakai area sampling yaitu teknik memilih sampel dari yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah atau wilayah geografis yang ada. Penetapan sampel di Kecamatan Kradenan dari 10 Desa Penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu Rumus Frank Lynch:

$$n = \frac{NZ^2P(1 - P)}{Nd^2 + (Z^2P(1 - P))}$$

Keterangan:

n = Sample Size

N = Population

Z = The Value of the normal variable (1,96) for reability of (0,95)

P = The Largest Possible Proportion (0,50)

d = Sampling error

- 0,025 for condition 1
- 0,05 for condition 2
- 0,10 for condition 3

Dengan jumlah populasi N= 73.598, dapat dihitung jumlah sampel yang akan dipakai menggunakan Rumus Frank Lynch.

$$\begin{aligned}n &= \frac{NZ^2P(1-P)}{Nd^2 + (Z^2P(1-P))} \\n &= \frac{39500 \cdot 0,50(1 - 0,50)}{39500 \cdot 0,10^2 + (3,84 \cdot 0,50 \cdot 0,5)} \\&= \frac{39500 \cdot 3,84 \cdot 0,50 \cdot 0,5}{395 + 0,96} \\&= \frac{37920}{395,96} \\&= 95,767 = 96\end{aligned}$$

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Adapun teknik analisis yang dipergunakan adalah sebagai berikut

a. Analisis data kualitatif

b. Analisis data Kuantitatif

Menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode statistik atau perhitungan dengan menggunakan angka-angka.

Langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif ini meliputi:

1. Analisis dengan korelasi Pearson (Product Moment Pearson)

Peneliti menggunakan Uji Pearson Product Moment untuk mencari hubungan variabel (X) dengan variabel (Y)

Uji ini menggunakan Korelasi Pearson Product Moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{N\sum x^2 - \sum x^2} \sqrt{N\sum y^2 - \sum y^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Nilai koefisien korelasi

$\sum X$ = Jumlah pengamatan variabel x

$\sum Y$ = Jumlah pengamatan variabel y

$\sum XY$ = Jumlah hasil perkaitan variabel x dan y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel x

$(\sum x)^2$ = jumlah kuadrat dari jumlah variabel x

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel y

N = Jumlah pengamatan y dan x

2. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi (Tafsiran Nilai r)

Validitas indikator akan ditentukan oleh besarnya koefisien korelasi antara skor indikator dalam konsep yang sama. Semakin besar koefisien korelasi, maka indikator akan semakin valid. Untuk mengetahui tinggi rendahnya nilai r pada Product Moment, dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.4

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Cukup
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Riduwan, 2003 : 228

3. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menunjukkan dua variabel yang diketahui dan yang akan diramalkan, dalam hal ini (Y) dengan variabel yang akan diketahui yaitu (X).

Karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, maka rumus yang digunakan adalah Rumus Regresi Sederhana, yaitu :

$$Y = a+bX$$

Harga a dan b dapat dicapai dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum X (\sum XY)}{n\sum X^2 - \sum X^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - \sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Partisipasi Masyarakat)

X = Variabel bebas (Status Sosial Ekonomi)

a = konstanta, di dapat dengan rumus $a = y - bX$

B = Korelasi regresi (peningkatan atau penurunan) variabel bebas terhadap variabel terikat, bila b positif berarti naik, bila b negatif berarti turun.

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji ini untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y, ditentukan dengan rumus:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan

KD = Besarnya Koefisien Determinasi (Penentu)

r = Koefisien korelasi

5. Uji Signifikansi (Uji t-test)

Uji t-test merupakan pengujian secara individual, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel (X) atau tidak terhadap variabel dependen (Y). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

T_{hitung} = nilai uji t-test

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Adapun langkah-langkah analisis data dan kaidah pengujian adalah sebagai berikut:

- Membuat H_0 dan H_a dalam bentuk kalimat

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Status Sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat

H_a = Ada pengaruh yang signifikan antara sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat

Membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi

- Menentukan nilai r hitung, dengan kaidah keputusan sebagai berikut :
 - jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
 - jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka ada hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
- Menentukan nilai t-hitung, dengan kaidah keputusan pengujian:
 - jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka tidak signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas (X) tidak mampu mempengaruhi variabel terikat (Y)
 - jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel bebas (X) mampu mempengaruhi variabel terikat (Y)
- Menentukan kaidah tingkat kesalahan dengan $\alpha = 0,05$
- Menentukan kesimpulan dari hubungan dan tingkat pengaruh variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) apakah mampu mempengaruhi secara signifikan.

PEMBAHASAN

1.1. Tabel Silang Status Sosial-Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pada bagian ini akan disajikan tabel silang variabel status sosial ekonomi dimana di dalamnya terdapat beberapa sub variabel yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kekayaan dan jabatan. Analisis dengan menggunakan tabel silang ini digunakan untuk mengetahui distribusi tanggapan responden terhadap variabel yang ada. Dengan penyajian data seperti ini akan diperoleh kecenderungan dari orientasi partisipasi masyarakat Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora.

B.1.2. Tabel Silang Pendidikan dengan Orientasi Pemilih

Berikut disajikan tabel silang antara pendidikan terhadap partisipasi masyarakat.

Tabel 3.9

Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pendidikan (X1)	Partisipasi Masyarakat (Y)				Jumlah
	Rendah	Kurang Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rendah	1 1,04%	2 2,08%	7 7,29%	3 3,13%	13 13,54
Kurang Tinggi	20 20,83	5 5,21	17 17,71%	10 10,42	52 54,17
Tinggi	7 7,29%	3 3,13%	2 2,08%	3 3,13%	15 15,63
Sangat Tinggi	7 7,29%	1 1,04%	2 2,08%	6 6,25%	16 16,67%
Jumlah	35 36,4%	11 11,46%	28 29,17%	22 22,92%	96 100%

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Pengaruh pendidikan dalam status sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat diterangkan melalui tabel 3.9 di atas. Responden yang memiliki pendidikan rendah dan partisipasi masyarakat yang rendah sebesar 1,04 persen. Responden yang memiliki pendidikan kurang tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebesar 17,71 persen. Responden yang memiliki pendidikan tinggi dan partisipasi masyarakat kurang tinggi sebesar 3,13 persen. Responden yang mempunyai pendidikan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat kurang tinggi sebesar 1,04 persen. Responden yang mempunyai pendidikan kurang tinggi serta memiliki partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 3,13 persen. Responden yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki partisipasi masyarakat sangat tinggi sebanyak 3,13 persen. Responden memiliki pendidikan kurang tinggi dan partisipasi rendah sebanyak 20,83 persen.

Menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy
- b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau tingkatan penghargaan yang meliputi informing, consultation dan placation
- c. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau degrees of citizen power yang meliputi partnership, delegated power dan citizen control

Menurut Angell adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi salah satunya pendidikan, merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan hasil tabulasi silang seperti di atas, dapat diambil suatu analisis berdasarkan Airnstein bahwa kondisi masyarakat memiliki pendidikan kurang tinggi memiliki partisipasi masyarakat rendah sebesar 20,83 persen. Membuktikan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Kradenan cenderung pada tingkat pertama yaitu Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan theraphy. Tetapi pada tabel juga menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan kurang tinggi dan partisipasi tinggi sebesar 17,71 persen, hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya pendidikan responden tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Kradenan.

Dengan hasil tabulasi silang di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada kecenderungan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) di Kecamatan Kradenan.

1.2. Tabel Silang Pekerjaan dengan Partisipasi Masyarakat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi tanggapan responden terhadap variabel yang ada. Berikut ini disajikan tabel silang antara pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

Tabel 3.10

Pengaruh Pekerjaan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pekerjaan(X2)	Partisipasi Masyarakat (Y)				Jumlah
	Rendah	Kurang Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rendah	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	10 10,42%	10 10,425
Kurang Tinggi	10 10,42%	6 6,25%	11 11,46%	3 3,13%	30 31,25%
Tinggi	21	5	17	8	51

	21,88%	5,21%	17,71%	8,33%	53,13%
Sangat Tinggi	4 4,17%	0 0,00%	0 0,00%	1 1,04%	5 5,21%
Jumlah	35 36,46%	11 11,46%	28 29,17%	22 22,92%	96 100%

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Responden yang memiliki pekerjaan rendah dan partisipasi masyarakat kurang tinggi sebesar 0,00 persen. Responden yang memiliki pekerjaan rendah dan partisipasi sangat tinggi sebanyak 10,42 persen. Responden yang memiliki pekerjaan kurang tinggi dan partisipasi tinggi sebanyak 11,46 persen. Responden yang memiliki pekerjaan tinggi dan partisipasi masyarakat rendah sebanyak 21,88 persen. Responden yang memiliki pekerjaan rendah dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 0,00 persen. Responden yang memiliki pekerjaan tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 17,71 persen.. Responden yang memiliki pekerjaan tinggi dan partisipasi masyarakat sangat tinggi sebanyak 1,04 persen.

Dengan pengertian lain, bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Kradenan mempunyai pekerjaan tinggi, dan pekerjaan tinggi masing-masing sebesar 21,88 persen dengan partisipasi masyarakat rendah serta responden yang mempunyai pekerjaan tinggi dengan partisipasi tinggi sebesar 17,71 persen. Berdasarkan teory merton, menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam pekerjaan mempunyai peranan yang tidak jarang menimbulkan konflik antar status. Dengan partisipasi rendah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menurut Arstein menurut tangga partisipasi yaitu jika partisipasi masyarakat rendah nantinya bisa jadi masyarakat hanya digunakan sebagai kedok melalui perencanaan-perencanaan pemerintah sedangkan untuk partisipasi masyarakat tinggi masuk pada tingkat placation, partnership, delegated power, citizen control yang mempunyai arti masyarakat sudah ikut dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan sebagai anggota dan kerjasama. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan

namun suara masyarakat sering kali tidak di dengar kedudukannya yang relative rendah. Tetapi di sisi lain tabel 3.10 menunjukkan bahwa pekerjaan tinggi dan partisipasi tinggi sebesar 17,71 persen, perbandingan dari pekerjaan tinggi dan partisipasi masyarakat rendah dengan pekerjaan tinggi dan partisipasi tinggi sebesar 4,17 persen, perbandingan yang relevan. Sehingga tidak ada pengaruh dari pekerjaan tinggi maupun rendah dapat berpartisipasi dalam acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

1.3. Tabel Silang Pendapatan dengan Partisipasi Masyarakat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh adanya kondisi pendapatan masyarakat Kecamatan Kradenan, berikut ini disajikan tabel silang antara pendapatan terhadap partisipasi masyarakat Musrenbang.

Tabel 3.11

Pengaruh Pendapatan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pendapatan (X3)	Partisipasi Masyarakat (Y)				Jumlah
	Rendah	Kurang Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rendah	5 5,21%	4 4,17%	2 2,08%	6 6,25%	17 17,71%
Kurang Tinggi	13 13,54%	4 4,17%	7 7,29%	5 5,21%	29 30,21%
Tinggi	11 11,46%	3 3,13%	14 14,58%	6 6,25%	34 35,42%
Sangat Tinggi	6 6,25%	0 0,00%	5 5,21%	5 5,21%	16 16,67%
Jumlah	35 36,46%	11 11,46%	28 29,92%	22 22,92%	96 100%

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Responden yang memiliki pendapatan rendah dan partisipasi masyarakat kurang tinggi sebesar 4,17 persen. Responden yang memiliki pendapatan kurang tinggi dan partisipasi tinggi sebanyak 7,29 persen. Responden yang memiliki pendapatan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 5,21 persen. Responden yang memiliki pendapatan tinggi dan partisipasi masyarakat rendah sebanyak 11,46 persen. Responden yang memiliki pendapatan rendah dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 2,08 persen. Responden yang memiliki pendapatan kurang tinggi dan partisipasi masyarakat rendah sebanyak 13,54 persen. Responden yang memiliki pendapatan kurang tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 3,13 persen. Responden yang memiliki pendapatan tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 14,58 persen. Responden yang memiliki pendapatan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 5,21 persen.

Mayoritas responden berada pada pendapatan tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi yaitu sebanyak 14,58 persen. Dengan pendapatan tinggi dan partisipasi rendah sebesar 11,46 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam masalah finansial. Posisi kedua terletak pada tabel 3.11 responden dengan pendapatan kurang tinggi dan partisipasi masyarakat sebesar 13,54 persen. Menurut Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak factor. Salah satunya adalah penghasilan atau pendapatan, pendapatan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam artian bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan , harus di dukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Termasuk keikutsertaan responden dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan ikut berpartisipasi.

1.4 Tabel Silang Jabatan dengan Partisipasi Masyarakat

Jabatan menunjukkan kedudukan seseorang dalam bidang tertentu yang mengakibatkan status sosial dalam masyarakat. Berikut ini disajikan tabel silang antara jabatan terhadap partisipasi masyarakat Musrenbang.

Tabel 3.12

Pengaruh Jabatan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Jabatan (X4)	Partisipasi Masyarakat (Y)				Jumlah
	Rendah	Kurang Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rendah	16 16,67%	8 8,33%	9 9,38%	13 13,54%	46 47,92%
Kurang Tinggi	7 7,29%	2 2,08%	7 7,29%	0 0,00%	16 16,67%
Tinggi	8 8,33%	1 1,04%	7 7,29%	7 7,29%	23 23,96%
Sangat Tinggi	4 4,17%	0 0,00%	5 5,21%	2 2,08%	11 11,46%
Jumlah	35 36,46%	11 11,46%	28 29,17%	22 22,92%	96 100%

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Responden yang memiliki jabatan rendah dan partisipasi masyarakat rendah sebesar 16,67 persen. Responden yang memiliki jabatan rendah dan partisipasi masyarakat sangat tinggi sebanyak 13,54 persen. Responden yang memiliki jabatan kurang tinggi dan partisipasi tinggi sebanyak 1,04 persen. Responden yang memiliki jabatan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 5,21 persen. Responden yang memiliki jabatan tinggi dan partisipasi masyarakat rendah sebanyak 8,33 persen. Responden yang memiliki jabatan rendah dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 9,38 persen. Responden yang memiliki jabatan kurang tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 7,29 persen. Responden yang memiliki jabatan tinggi dan

partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 7,29 persen. Responden yang memiliki jabatan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 5,21 persen.

Mayoritas responden memiliki jabatan rendah dan Partisipasi Masyarakat Rendah sebesar 16,67 persen. Masih relevan dengan teori Merton, ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu pekerjaan akan menimbulkan jabatan yang dapat menimbulkan perbedaan status. Partisipasi masyarakat Kecamatan Kradenan yang rendah, menunjukkan bahwa kecenderungan yang mengacu pada jabatan atau kelas sosial. Sesuai dengan criteria menggolong-golongkan anggota masyarakat yakni ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan sosial teratas. Seperti apa yang diungkapkan oleh Sarjono Soekanto kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan, ada dua macam kedudukan dalam artian dari keduanya bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tetapi dengan melihat tabel 3.12 tidak ada kecenderungan dari jabatan rendah maupun tinggi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Kradenan.

1.5 Tabel Silang Kekayaan dengan Partisipasi Masyarakat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi tanggapan responden terhadap variabel yang ada. Berikut ini disajikan tabel silang antara pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

Tabel 3.13

Pengaruh Kekayaan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Kekayaan (X5)	Partisipasi Masyarakat (Y)				Jumlah
	Rendah	Kurang Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	
Rendah	11 11,46%	7 7,29%	4 4,17%	10 10,42%	32 33,33%
Kurang Tinggi	14 14,58%	3 3,13%	13 13,54%	6 6,25%	36 37,50%
Tinggi	6 6,25%	1 1,04%	8 8,33%	5 5,21%	20 20,83%
Sangat Tinggi	4 4,17%	0 0,00%	3 3,13%	1 1,04%	8 8,335
Jumlah	35 36,46%	11 11,46%	28 29,17%	22 22,92%	96 100%

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Responden yang memiliki kekayaan rendah dan partisipasi masyarakat kurang tinggi sebesar 7,29 persen. Responden yang memiliki kekayaan kurang tinggi dan partisipasi tinggi sebanyak 13,54 persen. Responden yang memiliki kekayaan kurang tinggi dan partisipasi masyarakat rendah sebanyak 14,58 persen. Responden yang memiliki kekayaan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 3,13 persen. Responden yang memiliki kekayaan tinggi dan partisipasi masyarakat rendah sebanyak 6,25 persen. Responden yang memiliki kekayaan rendah dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 4,17 persen. Responden yang memiliki kekayaan tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 8,33 persen. Responden yang memiliki kekayaan sangat tinggi dan partisipasi masyarakat tinggi sebanyak 3,13 persen. Responden yang memiliki kekayaan tinggi dan partisipasi masyarakat sangat tinggi sebanyak 5,21 persen.

KESIMPULAN

Status Sosial Ekonomi sebagai ukuran kedudukan dalam masyarakat yang menimbulkan hak dan kewajiban berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

1. Berdasarkan penghitungan SPSS untuk regresi linear sederhana, menunjukkan bahwa koefisien regresi dari status sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) sebesar 0,474.. adalah positif dan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Ada hubungan antara status sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat” dapat diterima.
2. Berdasarkan Uji t (t-test) diketahui bahwa variabel bebas (status sosial-ekonomi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (partisipasi masyarakat) sebesar 5,220. Karena t-hitung (5,22) > t tabel sehingga hipotesis yang menyatakan “Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh status-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat” dapat diterima.
3. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi (KD) diperoleh sumbu/kontribusi status sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat. Dengan hasil penghitungan Koefisien yang signifikan antara status sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat” diterima.
4. Status Sosial Ekonomi yang didasarkan pada Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, Jabatan, dan Kekayaan, memiliki kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat

Kecamatan Kradenan memiliki kecenderungan pada Partisipasi, Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan, dan Infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA:

Emzir. 2010. *Metode penelitian kalitatif Analisis data*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Loekman, Soetrisno 1991. *Menuju masyarakat partisipatif*. Yogyakarta: kasinius

Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berepnghasilan Rendah*..Bandung: Penerbit Alumni hal 69-76

Parikesit,Danang.dkk,2007. *Kajian Aspek Kemasyarakatan di dalam pengembangan infrastruktur Indonesia*. Jakarta: Dir Riset dan Pengabdian Masy UI

Soekamto, Sarjono.2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soetomo. 2011.*Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharsimi, Arikunto 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan:

Pemerintah Kabupaten Blora.2012. *Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah